

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari dilakukan secara non penal dan penal. Upaya penegakan hukum secara non penal dilakukan oleh Polres Batanghari dengan cara melakukan Sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menggunakan jasa Calo, dan juga penangkapan terhadap calo CPNS yang diduga melakukan penipuan, melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penipuan, mengumpulkan barang bukti dan melakukan mediasi untuk mencari keputusan dari tahap penyidikan. Namun seluruh korban tindak pidana penipuan oleh calo CPNS ini memilih untuk menyelesaikan perkara sampai tahap putusan pengadilan. Selanjutnya upaya penegakan hukum secara penal dengan cara memberikan sanksi pidana melalui putusan pengadilan, dimana dari 2 kasus yang terjadi maka 1 orang calo CPNS mendapat hukuman pidana 3 tahun dan 1 orang calo CPNS mendapat hukuman 4 tahun pidana penjara.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari adalah ketidak hadirannya saksi korban apabila pemanggilan dari pihak kepolisian, pelapor yang tidak melanjutkan proses penyidikan, bukti dan saksi-saksi dari pelapor yang

belum lengkap, rumitnya prosedur dari instansi pemerintah untuk memberikan izin kepada saksi, serta kesadaran masyarakat yang mudah terbujuk oleh tindakan calo CPNS dan masyarakat yang sudah merasa dirugikan juga tidak memiliki kesadaran untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo CPNS kepada Polres Batanghari.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Polres Batanghari untuk terus melakukan upaya yang maksimal dalam menangani tindak pidana penipuan oleh calo CPNS, sehingga kasus ini dapat diminimalisir dan penerimaan CPNS di Kabupaten batanghari dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, terutama pihak-pihak yang menginginkan menjadi CPNS agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh calo CPNS, serta melaporkan kepada Polres Batanghari jika ditemukan adanya praktik penipuan oleh calo CPNS, sehingga penegakan hukum terhadap calo CPNS dapat berjalan optimal.
3. Diharapkan kepada Polres Batanghari juga memproses korban yang menggunakan jasa Calo, supaya masyarakat takut untuk menggunakan jasa Calo.